

Penyalahgunaan wewenang notaris untuk keuntungan pribadi studi kasus: putusan majelis pengawas wilayah notaris DKI Jakarta nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017 = Notary's abuse of authority for her own benefit: study case notary supervisor assembly of DKI Jakarta number 09/PTS/MJ.PWN.ROV.DKI.JAKARTA/XI/2017

Yunita Triyana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20493529&lokasi=lokal>

Abstrak

Dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia, tidak semuanya memiliki kualitas dan integritas yang sama baiknya. Tesis ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang Notaris MN untuk keuntungan pribadi dan akibat dari perbuatan Notaris atas tindakannya menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Dalam hasil penelitan ini ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang Notaris untuk keuntungan pribadi pada kasus ini dilakukan oleh Notaris MN dengan cara menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak dan membeli secara langsung objek perjanjian pada perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat dihadapannya. Perbuatan Notaris MN melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Selain sanksi administratif, Notaris MN juga seharusnya dikenakan sanksi perdata jika RA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Umum. Notaris sebagai pihak yang mengerti hukum dan melayani masyarakat tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan keadaan dalam pelaksanaan jabatannya. Judicial Review pasal 73 ayat (2) UUJN sebaiknya dilakukan untuk menghilangkan sifat final sanksi teguran lisan dan tertulis agar dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan dengan mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

<hr>

By the fact that there is a lot of Notary in Indonesia, not all of them have an equal quality and integrity. This thesis is about Notary MN that using her abuse of authority for her owns benefit and the consequences of her behavior by offering a loan to one of her client based on The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta Number 09/PTS/MJ.PWN.ROV.DKI.JAKARTA/XI/2017. The form of this research is using juridical normative method with descriptive analysis as the type of this research. This research has found that the abuse of authority has Notary MN done by offering a loan to one the parties and directly bought the land object in the Sale and Purchase Binding Agreement number 13 on October 27th 2005 that made before the Notary. For her behavior, Notary MN has violating article 16 paragraph (1) a of the Notary Act causing The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta gave her a written warning as administrative sanctions. Besides administrative sanctions, Notary MN should as well get tort accusation in public courts as civil sanctions. Notary as the society servant who known the law well should not using her abuse of authority and situation in while performing her position. Judicial Reviewing article 73(2) Notary Act ought to be done to eliminate the final clause in verbal and written sanction to make sure that the law could give the same opportunity to the aggrieved party.